

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL  
REPORTING* (ISR) PADA PERBANKAN SYARIAH DI  
INDONESIA**



Nama: Meigie Auriska

No. Mahasiswa: 12312294

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2016**

**Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap  
Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di  
Indonesia**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Meigie Auriska

No. Mahasiswa: 12312294

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 15 Oktober 2016

Penulis,



(Meigie Auriska)

**Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan  
*Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

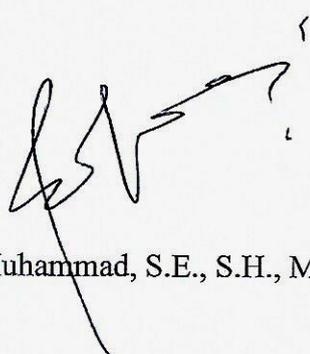
Nama: Meigie Auriska

No. Mahasiswa: 12312294

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal .....

Dosen Pembimbing,

 *Rifqi*  
*Rifqi*  
*24/10/2016*

Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP  
PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)**

Disusun Oleh : **MEIGIE AURISKA**

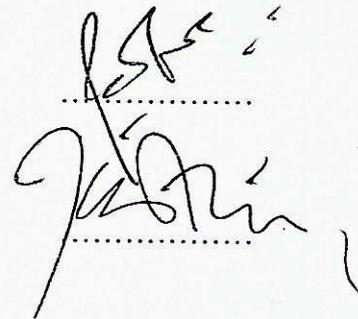
Nomor Mahasiswa : **12312294**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 15 November 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifki Muhammad, SE., SH., M.Sc, SAS.

Penguji : Yuni Nustini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



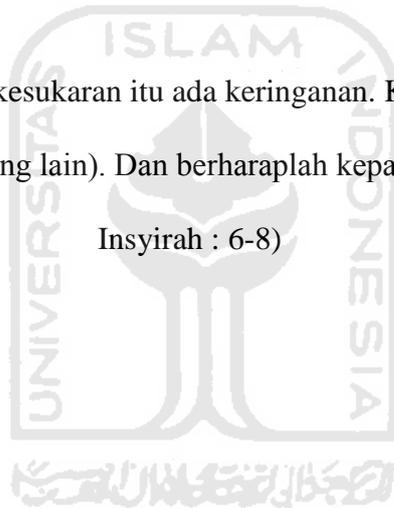
Dr. Agus Harjito, M.Si.

## MOTTO

“Kendaraan menuju keberhasilan adalah bekerja keras. Mereka yang menolak bekerja keras, karena telah menemukan konsep bekerja cerdas masih harus bekerja keras.” (Mario Teguh)

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.” (Q.S Al

Insyirah : 6-8)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Yang utama dari segalanya..

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Rahmat-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu

Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi in dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Saya persembahkan untuk...

Abah, Ibu, dan Adikku

Sahabat, terkasih, dan teman-temanku

Dan almamater yang ku banggakan...

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamina Segala Puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah serta nikmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat serta para pengikutnya, sehingga terselesaikannya tugas akhir/skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia.”** Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 pada Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi banyak pihak yang senantiasa dengan tulus ikhlas turut memberikan dukungan baik secara moril, materi maupun do'a. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan do'a dari orang-orang terdekat, sulit bagi penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih pada pihak dibawah ini:

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com(IS), PhD selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai, *staff*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Kongo Belgiansyah dan Ibu Susi Listiani. Terima kasih Abah Ibu atas doanya yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Dan juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada baik keluarga inti maupun keluarga besar dari abah dan ibu yang turut mendoakan yang terbaik untuk skripsi penulis ini. Lalu adik penulis yaitu Febby Nabilla Assyva yang turut mendoakan dan memberi semangat.
7. Mas Eko Desiyanto dan calon keluarga yang berada di Sragen yang mendoakan dan memberikan dukungan yang luar biasa bermanfaat.
8. Sahabat-sahabat perjuangan selama di bangku perkuliahan dan semoga hingga sudah beranjak tua *all member The Porwer of Nyaman* (Ricky

Setya Anggara S.E, Tia Meytafani, Gearika Elendri, Meilisa Marin, Nadia Rafiana S.E, Putri Mardiyah, Nisrina Nur Apriliani S.E, Athifa Fajri S.E, Ragil Hapsoro Mufti S.E, Andin S Rheza S.E, Deswa Prasetya S.Kom, Listiyorini S.Kom) yang selalu memberikan semangat dan menemani dari mulai mahasiswa baru hingga mendapatkan gelar sarjana strata-1.

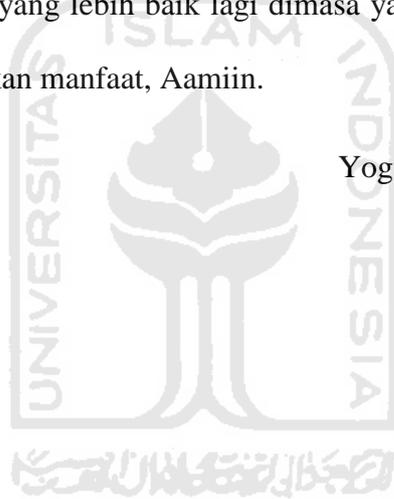
9. Teman-teman Asrama Ruhui Rahayu dan Asrama Lemlai Suri yang telah memberikan motivasi, semangat, inspirasi dan selalu menemani dalam susah maupun senang.
10. Sahabat-sahabat tersayang Anugerah Merdekawaty, Rossy Ramadhani, Emma Wachida S., dan anak-anak IPS 2012 SMAN 1 TARAKAN.
11. Teman-teman KKN Unit 234 dusun Klimbangan, Magelang (Bang Pras, Ney, Aldo, Gusti, Citra, Hendro, Indi) yang berbagi suka duka dalam menjalankan tugas kkn serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
12. Teman-Teman angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, semoga dipertemukan kembali suatu hari nanti dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat berbagi kisah kesuksesan masing-masing.
13. Teman-teman satu bimbingan skripsi pak Rifqi Muhammad yang telah selesai dan sedang melanjutkan S2 atau yang mencari/sudah bekerja maupun sedang berjuang menyelesaikan skripsi, tetap jaga semangat kalian untuk menggapai kesuksesan.

14. Teman-teman games Ingress Resistance Yogyakarta yang memberikan semangat selama menyelesaikan skripsi.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas perhatian dan curahan ide sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang akan membalas kebaikan seluruh pihak yang telah mendukung. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, Aamiin.

Yogyakarta, 15 Oktober 2016

Penulis,



Meigie Auriska

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Berita Acara .....	v
Motto.....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii
Abstrak .....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Legitimasi .....	8
2.1.2 Teori Stakeholder .....	8
2.1.3 Perbankan Syariah di Indonesia .....	9
2.1.3.1 Konsep Perbankan Syariah .....	10
2.1.3.2 Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	13
2.1.4 Laporan Keuangan.....	17
2.1.5 <i>Islamic Social Reporting</i> .....	18
2.1.6 Dewan Pengawas Syariah.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
2.3 Kerangka Pemikiran .....	23
2.4 Hipotesis Penelitian.....	23

## BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Penelitian Sampel .....	31
3.2 Metode, Jenis dan Sumber Data .....	32
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel .....	33
3.4 Metode Analisis Data .....	38
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	38

3.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	38
3.4.2.1 Uji Normalitas .....	38
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas .....	39
3.4.2.3 Uji Heteroskedasitas .....	39
3.4.2.4 Uji Autokorelasi .....	40
3.4.3 Analisis Regresi Berganda .....	40
3.4.4 Uji Hipotesis .....	42
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Objek Data .....	43
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	44
4.3 Analisis Data .....	45
4.3.1 Uji Normalitas Data .....	45
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	46
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	48
4.3.4 Uji Autokorelasi .....	49
4.3.5 Analisis Regresi Linier Berganda .....	51
4.4 Pembahasan .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	69

5.2 Keterbatasan Penelitian .....	70
5.3 Saran.....	71
5.4 Implikasi Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN.....	76



## DAFTAR TABEL

2.1 Tema Pengungkapan Indeks <i>Islamic Social Reporting</i> .....	19
2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
3.1 Daftar Bank Syariah.....	31
4.1 Prosedur Pernarikan Sampel .....	43
4.2 Hasil Statistik Deskriptif .....	44
4.3 Hasil Uji Normalitas .....	46
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
4.5 Hasil Uji Autokorelasi ( <i>Durbin-Watson</i> ).....	50
4.6 Hasil Uji Autokorelasi ( <i>Durbin-Watson</i> ) setelah Theil-Negar .....	50
4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	52
4.8 Hasil Uji F.....	57
4.9 Hasil Ringkasan Pengujian Hipotesis .....	68

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Indeks <i>Islamic Social Reporting</i>
Lampiran 2 Populasi dan Sampel Penelitian
Lampiran 3 Hasil input data sampel pada excel
Lampiran 4 Daftar Output <i>SPSS</i>



### ***Abstract***

*This research aims to investigate the influence Characteristics Sharia Supervisory Board (DPS) against the Islamic Social Reporting (ISR). Variable Characteristics Sharia Supervisory Board (DPS) consists of education level, frequency of meetings, Positions, Age, Reputation of the National Islamic Council, Number Sharia Supervisory Board, and Payroll.*

*This research was conducted by using secondary data processing to the annual report published by the Islamic banks in Indonesia. Methods of collecting samples in this study using purposive sampling method. The analysis tool in this research is multiple regression analysis. The processed data is the data 11 Islamic banks and Islamic business units in Indonesia for the period 2010-2014.*

*The results showed that the variables of the Sharia Supervisory Board has an influence on the disclosure of Islamic Social Reporting. The test results on the variable characteristics of sharia supervisory board, among others, education level, dual position, age, and number of sharia supervisory board has no influence on Islamic Social Reporting but the variable frequency of meetings, the reputation of the National Islamic Council, and wages have an influence on the disclosure of Islamic Social Reporting in islamic banking in Indonesia.*

*Keywords: Characteristics of the Sharia Supervisory Board, Islamic Social Reporting, Islamic banks*

## Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Variabel Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari Tingkat Pendidikan, Frekuensi Rapat, Rangkap Jabatan, Umur, Reputasi Dewan Syariah Nasional, Jumlah Dewan Pengawas Syariah, dan Gaji.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengolahan data sekunder terhadap laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh bank syariah di Indonesia. Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Data yang diolah merupakan data 10 bank syariah dan 1 unit usaha syariah di Indonesia untuk periode 2010 - 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil pengujian pada variabel karakteristik dewan pengawas syariah antara lain tingkat pendidikan, rangkap jabatan, umur, dan jumlah dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* tetapi variabel frekuensi rapat, reputasi Dewan Syariah Nasional, dan gaji memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci : Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, *Islamic Social Reporting*, bank syariah

## **BAB I**

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Indonesia sebagai Negara muslim terbesar dengan jumlah penduduk kurang lebih 80% yang beragama Islam, untuk menerapkan dan menjalankan sistem ekonomi alternatif tidak dapat dielakkan karena menjadi tuntutan masyarakat sejak berkuasanya sistem kapitalis dan sosialis. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Harus berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum yang ada dalam Islam (syariah) yaitu untuk menunjukkan karakteristik lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah terbentuk sebagai wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Terbukti secara empiris lembaga ini tetap bertahan dalam kondisi krisis ekonomi yang telah melumpuhkan perekonomian dan sosial masyarakat.

Perkembangan yang dialami perbankan syariah dari tahun ke tahun tidak terlepas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah pada bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Selain pengawasan yang bersifat operasional yaitu berupa audit keuangan dan operasional, pada bank syariah hal yang juga penting untuk dilakukan pengawasan yaitu audit syariah. Audit syariah tersebut dilaksanakan oleh Dewan

Pengawas Syariah namun sampai saat ini masih terkendala dengan sifat Dewan Pengawas Syariah yang *part time* yang mengakibatkan kurangnya kualitas audit syariah pada bank syariah. Karena pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah tersebut, maka Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah tersebut di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan bahwa:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut kedudukan Dewan Pengawas Syariah sudah jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain menjalankan fungsi ekonomis bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pertanggungjawaban bank syariah telah menjalankan fungsi sosial dalam kegiatan operasionalnya dengan melakukan pengungkapan yang dipublikasikan melalui laporan tahunan (*annual report*), *leaflet*, media masa maupun internet. Laporan tahunan (*annual report*) selain bersifat formal juga mencakup banyak aspek yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah tidak hanya aspek keuangan namun juga aspek lainnya seperti *corporate governance* dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial (*ISR*) perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) seperti tingkat pendidikan, frekuensi rapat, rangkap jabatan, umur, reputasi Dewan Pengawas Syariah, jumlah

anggota Dewan Pengawas Syariah dan gaji pada bank syariah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan judul “**Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *ISR* pada Perbankan Syariah di Indonesia.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *ISR* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana Karakteristik Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *ISR* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *ISR* pada Perbankan Syariah di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Syariah di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan perbankan syariah terkait tanggung jawab sosialnya.

2. Bagi Calon Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam menilai perbankan syariah.

3. Bagi Akademisi

Memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial di dalam laporan keuangan tahunan pada perbankan syariah, sehingga dapat membuka wawasan penelitian.

4. Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal ini disajikan dalam tiga bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari literatur-literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini diterangkan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu diuraikan desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan.

### **BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, serta membahas tentang objek dan variabel yang berkaitan dengan penelitian, analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca oleh pihak lain, serta pembahasan hasil penelitian yang menguraikan implikasi dari hasil analisis data.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi hasil evaluasi yang telah dirangkum menjadi suatu kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya, serta keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi Ghozali dan Chariri (2007) dalam Harto dan Widayuni (2014). Aktivitas perusahaan dapat mengakibatkan dampak terhadap masyarakat ataupun lingkungannya, baik itu dampak positif atau negatif. Pengungkapan sosial dibutuhkan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Kontrak sosial ini dapat dinilai dari kepuasan masyarakat. Apabila masyarakat merasa puas dengan perusahaan maka masyarakat akan membiarkan aktivitas perusahaan berjalan, begitu juga sebaliknya jika aktivitas perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan masyarakat tidak puas maka masyarakat akan mencabut “kontrak” perusahaan. Informasi baik yang disampaikan perusahaan akan membuat masyarakat lebih mudah menerima keberadaan perusahaan daripada menyampaikan informasi negatif atau pun tidak menyampaikan informasi.

##### **2.1.2 Teori Stakeholder**

Teori stakeholder merupakan teori yang mempertimbangkan seluruh pihak yang berkepentingan di perusahaan dalam lingkup luas Musibah dan Wan Sulaiman (2014) dalam penelitian Haryani (2015). Teori ini menunjukkan pengaruh yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, yaitu

pemegang saham, investor, kreditor, pekerja, pemasok, hingga rekan bisnis maupun pihak eksternal perusahaan yang memiliki kepentingan. Hanya memaksimalkan kepentingan salah satu pihak, misalnya pemegang saham, tidak boleh menjadi tujuan utama perusahaan. Seluruh pemangku kepentingan memiliki hak yang sama untuk dipertimbangkan secara adil.

Pengungkapan informasi sosial perusahaan dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Maka dari itu, semakin kuat *stakeholder*, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*. Semakin baik pengungkapan CSR perusahaan maka *stakeholder* juga akan semakin memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai laba.

### **2.1.3 Perbankan Syariah di Indonesia**

Muhammad (2010) menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha pemberian kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip islam. Didirikan bank dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat dan mengatur perekonomian Negara tanpa mengambil bunga dari nasabahnya karena semua biaya operasionalnya ditanggung oleh pemerintah yang diambil dari pembayaran pajak. Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Pada saat itu bank-bank konvensional mengalami keterpurukan yang amat sangat dan membuktikan bahwa sistem

perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga Keuangan Syariah menjadi potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa Sistem Ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

### 2.1.3.1 Konsep Perbankan Syariah

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan berbeda dengan bank non syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam bank syariah dalam pelaksanaan transaksi dan operasionalnya harus terhindar dari hal-hal yang mengandung *Maisyir* (judi/gambling), *Gharar* (ada unsur penipuan), *Riba*, dan *Bathil* (rusak/tidak syah), sedangkan dalam bank konvensional sangat kental dan erat dengan hal-hal tersebut di atas (Sudarsono, 2013). Dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dijelaskan kegiatan usaha bank syariah secara rinci sebagai berikut:

1. menghimpun dana meliputi:
  - a. Simpanan berupa giro berdasarkan akad *wadiah*.

- b. Investasi berupa tabungan berdasarkan akad *wadiah* atau *mudharabah*.
  - c. Investasi berupa deposito berdasarkan akad *mudharabah*.
  - d. Bentuk lainnya berdasarkan akad *wadiah* atau *mudharabah*
2. menyalurkan pembiayaan dana meliputi:
- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*.
  - b. Transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, akad *Ijarah*.
  - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan akad *qardh* dan *qard al hasan*, akad *hawalah*, akad *wakalah*, akad *sharf*, akad *rahn*, akad *kafalah*
    - 1. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan Akad *hawalah*
    - 2. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
    - 3. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.
    - 4. Berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*
    - 5. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
7. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
9. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
10. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah.
11. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3.2 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Dalam Sudarsono (2013) menjelaskan Produk dan jasa bank syariah dibagi menjadi tiga kategori yaitu : produk penghimpunan dana (*funding*), produk pembiayaan dana (*landing*) dan produk jasa (*service*).

#### 1. Produk Penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana atau sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus.

- a. *Al-Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum, yang harus dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. *Al Wadiah* terdiri dari dua jenis yaitu *Al Wadian Yad Amanah* dan *Al Wadiah Yad Dhamanah*.
- b. Investasi dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah* dan *mudharabah mutlaqh*. Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Hasil usaha ini akan dibagi sesuai dengan yang disepakati. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Sedangkan dalam *mudharabah mutlaqh*, merupakan *mudharabah* yang tidak disertai pembatasan penggunaan dana dari pemilik modal.
- c. Investasi Khusus dibagi menjadi dua yaitu *Al-Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* dan *Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*. Jenis investasi khusus *Al- Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu.

tu yang harus dipatuhi oleh bank. Sedangkan *Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dengan pelaksana usaha.

## 2. Pembiayaan Dana (*landing*)

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah kemudian disalurkan dengan bentuk pembiayaan kepada para nasabah dan anggotanya. Bank Syariah menggunakan prinsip Bagi hasil, Jual-beli dan Sewa. Prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Prinsip jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual-beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *ijarah*.

- a. *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana bank sebagai *Shahibul Maal* (pemilik modal) memberikan modal kepada nasabah sebagai *Mudharib* (pengusaha). *Mudharib* boleh melakukan kegiatan usaha yang produktif sesuai dengan akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (*nisbah*).
- b. *Musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara bank dengan beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam kemitraan. Pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal.

- c. *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
3. *Salam* adalah *akad* pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya dimana pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.
- d. *Istishna* mengikuti ketentuan dan aturan *akad salam* namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran (*termin*).
- e. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

4. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam perbankan *Qardh* sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang sangat pendek dan untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial (*Qardh al hasan*).
  - a. *Hawalah* adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Tidak diperbolehkan pemngambilan manfaat atas pengalihan hutang piutang tersebut. Bank hanya diperbolehkan menerima fee atas jasa penagihan.
  - b. *Wakalah* adalah Akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam perbankan *Wakalah* digunakan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C impor) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor).
  - c. *Sharf* adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau pertukaran valuta asing.
  - d. *Rahn* adalah menyimpan sementara harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Harta yang disimpan sementara dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.
  - e. *Kafalah* adalah Akad jaminan dari suatu pihak kepada pihak lain.

#### 2.1.4 Laporan Keuangan

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK yang terkait. Entitas syariah yang dimaksud dalam PSAK 101 adalah entitas syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. (paragraf 3).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2012) disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah dan bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan baik internal maupun eksternal serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Informasi yang disajikan oleh entitas syariah memiliki komponen yang lebih banyak dibandingkan komponen entitas konvensional lainnya, meliputi: Asset, Kewajiban, Dana *syirkah* temporer, Ekuitas, Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, Arus kas, Dana zakat, Dana kebajikan. Informasi tentang dana *syirkah* temporer, dana zakat, maupun dana kebajikan merupakan informasi yang menjadi karakteristik khusus bagi entitas syariah.

### 2.1.5 *Islamic Social Reporting (ISR)*

Pelaporan sosial, merupakan tindakan yang mencerminkan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan perusahaan seperti konsumen, pemegang saham maupun lingkungan. Pelaporan sosial dalam entitas syariah dikenal dengan istilah *ISR (Islamic Social Reporting)* yaitu pelaporan kinerja sosial organisasi Islam. Haniffa (2002) menjelaskan tujuan dalam *Islamic Social Reporting* yaitu sebagai akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. Penyajian informasi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan esensinya hampir sama yaitu merupakan wujud kepedulian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat.

Pelaporan sosial dalam perbankan syariah kemudian dikembangkan dengan menggunakan *Islamic Social Reporting Index*. Indeks *Islamic Social Reporting* merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar *CSR* yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item *CSR* yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman et al, 2010).

Dalam Rahayu ( 2014) dikatakan Indeks *Islamic Social Reporting* diyakini dapat menjadi standar pengungkapan *CSR* yang sesuai dengan perspektif Islam dan sesuai untuk diterapkan dalam perbankan syariah.

**Tabel 2.1**

**Tema Pengungkapan Indeks ISR**

<b>Tema</b>	<b>Etika</b>	<b>Isi</b>
Investasi dan Keuangan	Tauhid Halal v Haram	Aktivitas-aktivitas Riba: Idetifikasi aktivitas-aktivitas tersebut dan % terhadap keuntungan. Aktivitas-aktivitas Gharar: Idetifikasi aktivitas-aktivitas tersebut dan % terhadap keuntungan. Zakat: Jumlah dan penggunaan.
Produk	Tauhid Halal v Haram	Sifat Produk dan Jasa : Idetifikasi aktivitas-aktivitas tersebut dan % terhadap keuntungan
Pegawai	Tauhid Adil Amanah	Gaji Sifat pekerjaan: Perintah agama; Libur dan cuti; Jam kerja. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaan Kesempatan
Masyarakat	Tauhid Ummah Amanah Adil	Shadaqah: Jumlah dan Penggunaan Wakaf: Jenis dan Nilai Qardh al Hasan: Jumlah dan Penggunaan
Lingkungan	Tauhid Khilafah Mizan Akhirah I'tidal v Israf	Penggunaan Sumber Daya: Deskripsi dan Jumlah Konservasi lingkungan: Deskripsi dan Jumlah

### 2.1.6 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Profesi ini lahir dan besar dari tuntutan publik akan adanya suatu jaminan akan penerapan konsistensi dan loyalitas dalam syariat islam.

Jasa profesional dari Dewan Pengawa Syariah merupakan kewajiban yang harus diemban olehnya sebagai pihak yang disertai tanggung jawab untuk membuat pelaporan dan verifikasi yang mana nantinya output yang telah dihasilkannya tidak hanya digunakan oleh klien (pihak bank ybs), namun juga oleh pihak ketiga atau *public* (investor/pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat dll). Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengamati secara teliti bagaimana bentuk-bentuk operasional dari perikatan atau *akad* yang ada pada lembaga keuangan syariah dan mampu memberikan penilaian, pengawasan secara maksimal dalam rangka menjaga kesyariahan produk-produk bank syariah.

Semakin meluasnya jaringan perbankan dan keuangan syariah, maka Dewan Pengawas Syariah, harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syariah tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan aspek syariahnya. Jika peran Dewan Pengawas Syariah tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap

praktik syariah yang berakibat pada pelanggaran *syariah compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan (Agustianto, 2008). Peran Dewan Pengawas Syariah perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional bank syariah benar-benar sesuai syariah. Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, anggota Dewan Pengawas Syariah harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan dan berpengalaman luas di bidang hukum Islam. Dengan demikian kualifikasi menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah haruslah memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perbankan. Namun, sangat disayangkan masih banyak Dewan Pengawas Syariah yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan.

## 2.1 Penelitian terdahulu

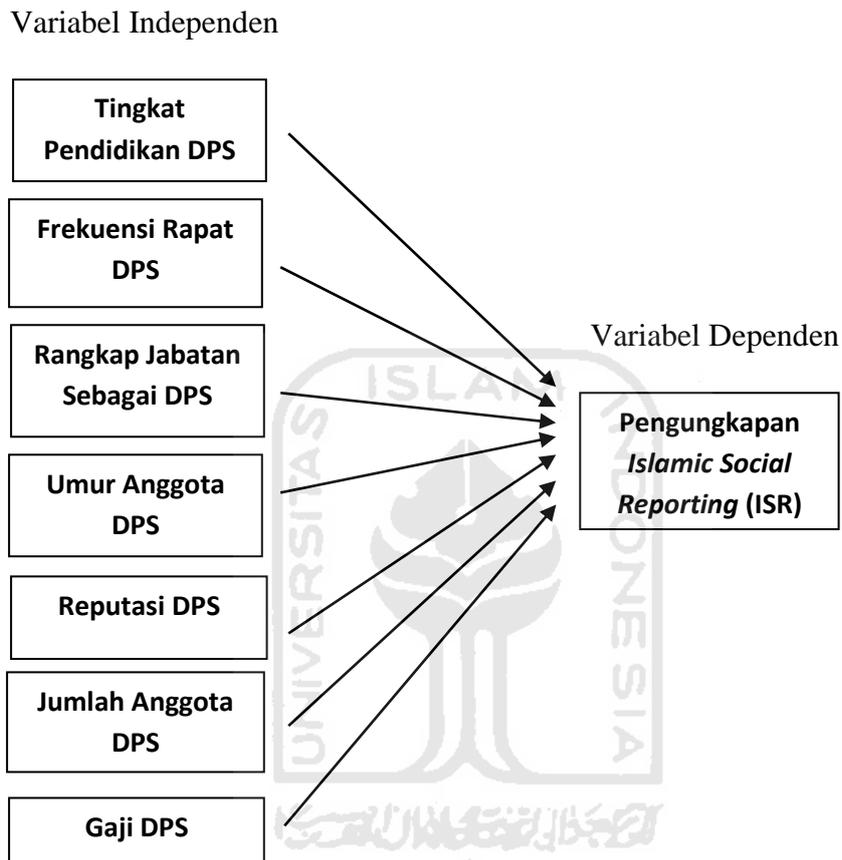
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Sampel/Populasi	Kesimpulan
Fitria dan Hartanti (2010)	Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan <i>Global Reporting Initiative Indeks</i> dan <i>Islamic Social Reporting Indeks</i>	3 Bank Konvensional dan 3 Bank Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah.</li> <li>2. Berdasarkan checklist indeks <i>Islamic Social Reporting</i> diperoleh hasil bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga bank syariah masih terbatas atau hanya dapat memenuhi 50% dari skor maksimal jika semua item diungkapkan secara sempurna.</li> </ol>
Yasmin Umar Assegaf ; Falikhatun ; Salamah Wahyuni	Bank Syariah Di Indonesia: <i>Corporate Governance</i> Dan Pengungkapan Pertanggungjawaban	5 Bank Usaha Syariah dan 8 Unit Usaha Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semua proksi dalam <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap variasi pengungkapan, sehingga disarankan untuk perbankan syariah di Indonesia lebih banyak</li> </ol>

Penulis	Judul	Sampel/Populasi	Kesimpulan
(2012)	Sosial Islami <i>(Islamic Social Responsibility Disclosure)</i>		mengungkapkan aktifitas sosial Islami yang lebih bervariasi, tidak hanya penanaman sejuta pohon, tapi juga kegiatan pemeliharannya.
Ribut Sri Rahayu (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perbankan syariah.	Seluruh perbankan syariah di Indonesia	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>2. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>5. Leverage tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>6. Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap CSR</li> </ol>
Nikmah Rahmawati (2012)	Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah ( <i>Syari'a Supervisory Board</i> ) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia	Seluruh perbankan syariah di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung-jawab langsung di bawah wewenang direksi suatu lembaga keuangan syariah.</li> <li>2. Masih banyak lembaga-lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah yang belum memanfaatkan secara maksimal peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di lembaganya, namun disisi lain peningkatan profesionalisme sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dalam mengemban amanah ummah masih dirasakan belum maksimal.</li> </ol>

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Sebelum melakukan pengembangan hipotesis terlebih dahulu akan disajikan kerangka pemikiran penelitian yang disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Tingkat Pendidikan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Salah satu hal yang kongkrit untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga manusia adalah pendidikan dan keterampilan agar mampu mengemban tugas dan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan isi kerja

akan mendorong kemajuan setiap usaha yang pada gilirannya akan juga meningkatkan pendapatan, baik pendapatan perorangan, kelompok maupun pendapatan nasional.

Shiddieqoh (2014) bahwa seorang Dewan Pengawas Syariah seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi dan sistem perbankan dan khusus dalam bidang hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas, maka bank-bank syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan mengangkat Dewan Pengawas Syariah dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat pendidikan tersebut maka dibentuk hipotesis dari penelitian ini yaitu:

**H1: Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia**

#### **2.4.2 Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah**

Salah satu kegiatan rapat Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan opini-opini mengenai semua kegiatan operasional, produk dan penyaluran dana termasuk mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan. Apabila Dewan Pengawas Syariah semakin intens dalam melakukan pertemuan atau rapat, maka tidak menutup kemungkinan koordinasi Dewan Pengawas

Syariah akan semakin baik dan pengawasan akan semakin efektif sesuai prinsip syariah serta Dewan Pengawas Syariah akan sering memberikan kontribusi atau masukan-masukan kepada pihak manajemen dalam hal penyaluran dana sosial sehingga pengungkapan *Islamic Social Reporting* akan lebih luas (Intan, 2014).

Dalam peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia disebutkan:

1. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup agar pelaksanaan tugasnya berjalan optimal, dan Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, dan remunerasi serta fasilitas yang diterima dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, dengan masa transisi pemberlakuan 1(satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam Rahayu (2014) dikatakan secara logika semakin sering rapat dilaksanakan maka semakin bagus pengawasan terhadap pengungkapan CSR yang dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chariri (2012). Untuk mengetahui adanya pengaruh frekuensi rapat tersebut maka dibentuk hipotesis dari penelitian ini yaitu:

## **H2: Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia**

### **2.4.3 Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah**

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan di empat lembaga keuangan syariah. Ini menjadikan ketentuan mengenai dewan pengawas syariah (DPS) di bank menjadi lebih fleksibel. Sebelumnya berdasar PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan merangkap jabatan di dua bank syariah dan dua lembaga keuangan bukan bank. Namun dengan ketentuan baru anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjabat di lembaga keuangan lainnya, tak hanya terpatok pada dua bank. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat membuat Dewan Pengawas Syariah berperan lebih efektif.

Penelitian Abdullah et al (2011) dalam Rizkiningsih (2012) bahwa Dewan pengawas syariah yang menjabat pada beberapa intitusi finansial islam dapat meningkatkan pengungkapan informasi karena dapat melakukan perbandingan pada pelaporan perusahaan sehingga dapat mengetahui pelaporan manakah yang terbaik. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari rangkap jabatan tersebut maka dibentuk hipotesis dari penelitian ini yaitu:

**H3: Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia**

#### **2.4.4 Umur Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Haniffa dan Cooke (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan umur yang lebih muda kemungkinan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap aturan. Sedangkan Akhtaruddin (2005) menyatakan bahwa perusahaan dengan umur yang lebih tua akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam laporan tahunannya dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di pasar.

Sehubungan dengan dua pernyataan diatas, dalam penelitian ini akan diuji tentang pengaruh umur dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Umur yang semakin tua menunjukkan semakin berpengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut. Semakin tua umur anggota Dewan Pengawas Syariah, maka semakin banyak pula saran-saran pengungkapan yang perlu dilakukan. Untuk mengetahui adanya pengaruh umur tersebut maka dibentuk hipotesis dari penelitian ini yaitu:

**H4: Umur Anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia**

#### 2.4.5 Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah

Dalam Khoirudin (2013) dijelaskan faktor lain yang diduga mempengaruhi *Islamic Social Reporting* adalah ukuran dewan pengawas syariah. Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah. Hal ini karena Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* perbankan.

Penelitian Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa *Islamic Governance* (sebagai proksi *corporate governance* di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam variabel *Islamic Governance* tersebut dibahas mengenai jumlah dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan level pengungkapan. Untuk mengetahui adanya pengaruh jumlah dari anggota tersebut maka dibentuk hipotesis dari penelitian ini yaitu:

**H5: Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia**

#### 2.4.6 Reputasi Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No : Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah dan diharapkan mampu untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan perekonomian dan keuangan.

Dalam Mubarak (2012) Surat Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI) anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan satu-satunya badan yang berwenang dan mempunyai tugas utama untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan. Dari penjelasan ini dapat menjadikan tolak ukur yang baik bagi anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian dari Dewan Syariah Nasional mampu meningkatkan kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan ajaran Islam pada kegiatan operasionalnya terutama pada pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari reputasi dewan pengawas syariah tersebut maka dibentuk hipotesis dari penelitian ini yaitu:

**H6: Reputasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia**

#### 2.4.7 Gaji Dewan Pengawas Syariah

Kompensasi adalah semua bentuk *return* baik finansial maupun non finansial yang diterima karyawan, karena jasa yang disumbangkan ke perusahaan. Kompensasi finansial berbentuk gaji, upah, bonus, komisi, asuransi karyawan, bantuan sosial karyawan, tunjangan, libur atau cuti tetapi tetap dibayar, dan sebagainya. Sedangkan kompensasi non finansial berupa tugas yang menarik, tantangan tugas, tanggungjawab tugas, peluang, pengakuan, pencapaian tujuan serta lingkungan pekerjaan yang menarik (Schuler dan Huber, 1993).

Menurut Sigit (2003) dalam penelitian Ernawati dan Ibrahim (2014) menyatakan bahwa yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pemberian kompensasi adalah bahwa kompensasi itu harus layak, adil, dapat diterima, memuaskan, memberi motivasi kerja, bersifat penghargaan, dan sesuai dengan kebutuhan. Pemberian kompensasi akan memberikan manfaat kepada dua belah pihak, baik kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak karyawan. Ada berbagai macam bentuk kompensasi yang dapat dipilih oleh pihak perusahaan untuk diberikan kepada karyawannya. Macam dan besar kompensasi tidak akan sama antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Untuk mengetahui adanya pengaruh gaji tersebut maka dibentuk hipotesis dari penelitian ini yaitu:

**H7: Gaji Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah laporan tahunan dari 12 BUS (Bank Umum Syariah) yang terdaftar di Bank Indonesia dan 22 UUS (Unit Usaha Syariah) di Indonesia dengan periode 2010-2014. Penelitian ini meneliti pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Variabel *Islamic Social Reporting* sebagai variabel dependen sedangkan variabel karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari tujuh unsur, sebagai variabel independen.

Dikarenakan beberapa laporan tahunan bank tidak memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai sampel oleh peneliti hanya mengambil 10 BUS (Bank Umum Syariah) dan 1 UUS (Unit Usaha Syariah). Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang digunakan sebagai sampel yaitu:

**Tabel 3.1 Daftar Bank Syariah**

No.	Nama Bank	Jenis
1.	PT. BCA Syariah	BUS
2.	PT. BNI Syariah	BUS
3.	PT. BRI Syariah	BUS
4.	PT. Bank Syariah Bukopin	BUS

No.	Nama Bank	Jenis
5.	PT. Bank Syariah Mandiri	BUS
6.	PT. Bank Mega Syariah Indonesia	BUS
7.	PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia	BUS
8.	PT. Bank Panin Syariah	BUS
9.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPNS)	BUS
10.	Bank Jawa Barat Banten Syariah	BUS
11.	Bank Tabungan Negara Syariah	UUS

### 3.2 Metode, Jenis dan Sumber Data

#### 3.2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara yaitu sebagai berikut :

1. Data kuantitatif digunakan penulis dalam penelitian ini karena data yang digunakan berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Data sekunder digunakan sebagai sumber data oleh penulis, karena sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data diperoleh dari dokumentasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dalam periode 2010-2014. Pengambilan data perusahaan berupa annual report yang diperoleh

dari website masing-masing perbankan. Data-data yang ada pada annual report perusahaan tersebut akan digunakan untuk mengisi kriteria karakteristik DPS dan indeks Islamic Social Reporting.

2. Studi kepustakaan sebagai sumber data untuk mendapatkan teori dan bahan analisis. Dan diperoleh dari buku, jurnal, beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, laporan keuangan tahunan perbankan syariah di Indonesia, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan informasi dokumentasi lain yang dapat di ambil melalui internet.

### **3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel**

#### **3.3.1 Informasi yang Harus Diungkapkan dalam Pelaporan Sosial**

Informasi yang diukur dalam penelitian ini yang digunakan untuk melihat hubungan antara praktik pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan karakteristik pribadi anggota dewan pengawas syariah (DPS), sebagai bagian dari mekanisme good corporate governance. Pengungkapan Islamic Social Reporting perbankan Syariah diukur dengan melihat kesesuaian dengan kriteria indeks *Islamic Social Reporting* yang terdapat 45 komponen didalamnya, diberi skor 1 apabila komponen terdapat pada laporan dan 0 jika tidak. Skor tersebut kemudian dijumlahkan, apabila terpenuhi semua maka skor total 45. Berikut adalah detail informasi atau *item* pertanyaan yang harus diungkapkan dalam pelaporan sosial perbankan syariah:

- I. Tanggungjawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)
  1. Nama anggota DPS dan kualifikasinya

2. Ruang lingkup pekerjaan dan penyesuaian terhadap ketentuan hukum
  3. *Review*/lingkup pemeriksaan
  4. Opini terhadap hasil pemeriksaan
  5. Rekomendasi untuk perbaikan
  6. Tanda tangan anggota DPS
  7. Gaji/Remunerasi DPS
- II. Informasi Produk dan Jasa
1. Informasi mengenai produk dan jasa baru
  2. Persetujuan produk baru dari DPS
  3. Daftar/definisi produk yang ditawarkan
  4. Informasi umum kegiatan investasi
  5. Informasi umum dari kegiatan pembiayaan
- III. Pengelolaan Zakat
1. Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat
  2. Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya
  3. Pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat
- IV. Pinjaman Qardh Al-Hasan
1. Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman qardh
  2. Sumber dana yang dialokasikan untuk qardh
  3. Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat
- V. Kegiatan Amal dan Sosial
1. Sifat kegiatan amal dan social
  2. Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini

3. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini

VI. Transaksi yang melanggar hukum (haram)

1. Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut
2. Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini
3. Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal

VII. Tanggungjawab kepada Karyawan

1. Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya
2. Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan
3. Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan
4. Kebijakan di lingkungan kerja
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan
6. Apresiasi terhadap karyawan
7. Penghargaan karyawan (bonus, dll)

VIII. Tanggungjawab kepada Masyarakat

1. Menciptakan kesempatan kerja
2. Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat
3. Mensponsori kegiatan masyarakat
4. Pernyataan komitmen untuk peran social
5. Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah, Perbankan dan keuangan
6. Magang untuk mahasiswa

IX. Aspek Pengembangan Komunitas masyarakat

1. Peran bank pada perkembangan ekonomi
2. Peran bank dalam menangani masalah sosial
3. Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor
4. Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil

X. Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien

1. Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah
2. Jumlah yang dibebankan sebagai penalti/denda, jika ada
3. Opini syariah mengenai diperbolehkannya membebankan biaya tambahan (seperti penalti/denda)
4. Pengakuan pembayaran penalti/denda sebagai sumber pendapatan lain.

3.3.2 Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Penelitian ini mengambil tingkat pendidikan dari dewan pengawas syariah, frekuensi rapat, rangkap jabatan, umur, reputasi dewan pengawas syariah, jumlah dan gaji dewan pengawas syariah sebagai variabel bebas. Pengukuran atas setiap variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan menunjukkan kompetensi dari anggota dewan pengawas syariah. Penilaiannya berupa pemberian skor, yaitu (0) untuk lulusan S1 dan S2, (1) untuk lulusan S3.
2. Frekuensi rapat, semakin intens dalam melakukan rapat maka pengawasan akan semakin efektif sesuai prinsip syariah. Penilaiannya berupa

- pemberian skor, yaitu (1) melakukan rapat < 10 kali, (2) melakukan rapat 11-20 kali, (3) melakukan rapat >20 kali.
3. Rangkap Jabatan, rangkap jabatan sebagai ketua maupun anggota Dewan Pengawas Syariah pada bank atau organisasi lain menunjukkan kompetensi dari anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut. Penilaiannya berupa pemberian skor, yaitu (0) tidak ada Dewan Pengawas Syariah merangkap jabatan, (1) 1 anggota merangkap jabatan, (2) 2 anggota merangkap jabatan, (3) 3 anggota merangkap jabatan.
  4. Umur, umur anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut diberi penilaian berupa skor, yaitu (1) untuk umur 30 tahun-40 tahun, (2) untuk umur 41 tahun-60 tahun, (3) untuk umur >60 tahun.
  5. Reputasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), termasuk dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) menambah penilaian kualitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Penilaiannya berupa pemberian skor, yaitu (0) tidak ada Dewan Pengawas Syariah termasuk dalam Dewan Syariah Nasional, (1) 1 anggota, (2) 2 anggota, (3) 3 anggota.
  6. Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS), semakin banyak jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak menutup kemungkinan koordinasi dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah akan semakin baik. Penilaiannya berupa pemberian skor, yaitu (1) 1 anggota DPS, (2) 2 anggota DPS, (3) 3 anggota DPS.

7. Gaji, tidak menutup kemungkinan semakin besar gaji yang diperoleh anggota Dewan Pengawas Syariah memotivasi kinerja yang lebih baik. Penilaiannya berupa pemberian skor, yaitu (1) gaji <200 juta, (2) gaji 200 juta-300 juta, (3) gaji >300 juta.

### **3.4 Metode Analisis Data**

#### **3.4.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini. Pengukuran yang digunakan mencakup nilai rata-rata (*mean*), minimum, dan maksimum yang disajikan dalam tabel numerik yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 16.

#### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Untuk menguji hipotesis penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda. Sebagai prasyarat regresi linier berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya bersifat efisien (Ghozali, 2009).

##### **3.4.2.1 Uji Normalitas**

Ghozali (2007) Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau distribusi data mendekati pola seperti distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov sminorv*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05.

Jika nilai signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal dan diterima. Jika menghasilkan  $< 0,05$  maka ditolak dan dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

#### 3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya, (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* untuk menunjukkan ada tidaknya multikolinearitas adalah nilai VIF lebih dari 10 ( $VIF \geq 10$ ) dan nilai *tolerance* kurang dari 0,1 ( $tolerance \leq 0,1$ ).

#### 3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (*DW test*) (Ghozali, 2011).

Nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari pengolahan data secara statistik dengan SPSS yaitu ( $d$ ) dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 5%, jumlah sampel ( $n$ ) dan jumlah variabel bebas ( $k$ ). Dari pengamatan tabel Durbin-Watson dengan jumlah sampel, jumlah variabel bebas dan tingkat signifikan tertentu tersebut diperoleh nilai batas atas ( $du$ ). Penelitian tidak terjadi autokorelasi apabila nilai  $du < d < 4-du$ .

#### 3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan DPS (TPDPS), frekuensi rapat DPS (FRDPS), rangkap jabatan DPS (RJDPS), umur DPS (UDS), reputasi DSN (RDSN), jumlah DPS (JDPS), dan gaji DPS (GDPS) terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Seberapa besar variabel independen mempengaruhi variable dependen dihitung dengan menggunakan garis regresi berganda berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \epsilon$$

Dimana:

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1$   $\beta_2$  dan  $\beta_3$  : Koefisien regresi dari  $X_1, X_2, X_3$

$Y$  : *Islamic Social Reporting (ISR)*

$X_1$  : Variabel TPDPS

$X_2$  : Variabel FRDPS

$X_3$  : Variabel RJDPS

$X_4$  : Variabel UDPS

$X_5$  : Variabel RDSN

$X_6$  : Variabel JDPS

$X_7$  : Variabel GDPS

$\varepsilon$  : Kesalahan hitung (variable error)

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software Statistical Program for Social Science (SPSS) 16*, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah dalam perhitungan statistiknya.

### 3.4.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.4.4.1 Uji F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2005) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.4.4.2 Uji -t (Uji Signifikan Parsial)

Uji-t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5$  persen). Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria apabila nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara parsial variabel berpengaruh terhadap variabel independen. Dan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara parsial variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah dan unit usaha syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan manajerial periode 2010 sampai dengan 2014. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Selama tahun 2010 sampai dengan 2014 didapat 10 perbankan syariah dan 1 unit usaha syariah yang memenuhi kriteria penelitian.

**Tabel 4.1**  
**Prosedur Penarikan Sampel**

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Perbankan Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang menerbitkan Laporan Keuangan dan Laporan Manajerial pada BEI periode 2010-2014	11 BUS 6 UUS	12 BUS 6 UUS	12 BUS 6 UUS	12 BUS 6 UUS	12 BUS 6 UUS
2	Perbankan Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak memiliki data lengkap	(3) BUS (4) UUS				
<b>Jumlah Observasi</b>		10	11	11	11	11
<b>Total Observasi</b>		54				

## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif akan memberikan gambaran umum variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.2  
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
tingkat_pendidikan_DPS	54	1.00	2.00	1.4630	.50331
frekuensi_rapat_DPS	54	.00	3.00	1.1852	1.02927
rangkap_jabatan_DPS	54	.00	2.00	.9074	.65209
umur_DPS	54	.00	3.00	1.4444	1.17629
reputasi_DPS	54	2.00	3.00	2.6481	.48203
jumlah_DPS	54	.00	2.00	.8148	.72876
gaji_DPS	54	.00	3.00	2.1852	1.13394
indeks_ISR	54	.00	.69	.4419	.21483
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.2 terdapat 54 sampel yang sesuai kriteria dalam pengolahan data. Alat pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *SPSS 16*. Berikut adalah penjelasannya:

1. Variabel tingkat pendidikan DPS memiliki nilai minimum sebesar 1.00 dan nilai maximum sebesar 2.00 dengan rata-rata sebesar 1.4630 dan standar deviasi sebesar 0.50331.
2. Variabel frekuensi rapat DPS memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 3.00 dengan rata-rata sebesar 1.1852 dan standar deviasi sebesar 1.02927.

3. Variabel rangkap jabatan DPS memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 2.00 dengan rata-rata sebesar 0.9074 dan standar deviasi sebesar 0.65209.
4. Variabel umur DPS memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 3.00 dengan rata-rata sebesar 1.4444 dan standar deviasi sebesar 1.7629.
5. Variabel reputasi DPS memiliki nilai minimum sebesar 2.00 dan nilai maximum sebesar 3.00 dengan rata-rata sebesar 2.6481 dan standar deviasi sebesar 0.48203.
6. Variabel jumlah DPS memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 2.00 dengan rata-rata sebesar 0.8148 dan standar deviasi sebesar 0.72876.
7. Variabel gaji DPS memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 3.00 dengan rata-rata sebesar 2.18852 dan standar deviasi sebesar 1.13394.

### **4.3 Analisis Data**

#### **4.3.1 Uji Asumsi Klasik Normalitas**

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji

*One-Sample Kolmogorov Smirnov*. Hasil uji normalitas disajikan dalam Tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas**  
**Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov**

	Unstandardized Residual
N	54
Normal Parameters <sup>a</sup> Mean	.0000000
Std. Deviation	.13176658
Most Extreme Absolute Differences	.137
Positive	.137
Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z	1.005
Asymp. Sig. (2-tailed)	.265

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika probabilitas ( $p$ ) uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov*- $Z > 0,05$ . Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,265 karena nilai probabilitas  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas saling berhubungan secara linear. Multikolinearitas biasa terjadi apabila seluruh variabel bebas berkorelasi kuat. Uji ini dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) hitung berkisar pada nilai 1 atau lebih rendah dari 0,10

sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang terdapat pada masing-masing variabel.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas**

**Koefisien<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.503	.275		-1.828	.074		
tingkat_pendidikan_DPS	-.100	.158	-.235	-.632	.530	.059	16.810
frekuensi_rapat_DPS	.129	.028	.620	4.660	.000	.461	2.168
rangkap_jabatan_DPS	-.074	.063	-.226	-1.191	.240	.227	4.406
umur_DPS	.009	.024	.048	.365	.717	.481	2.079
reputasi_DPS	.305	.135	.683	2.253	.029	.089	11.253
jumlah_DPS	-.080	.059	-.270	-1.354	.182	.206	4.860
gaji_DPS	.115	.058	.608	1.995	.052	.088	11.353

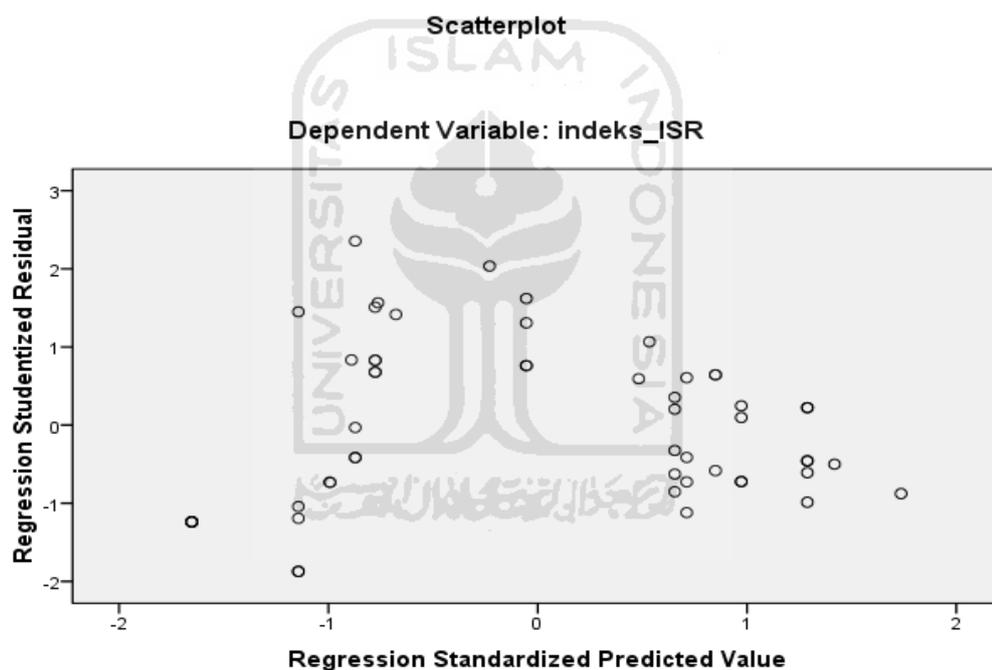
a. Dependent Variable: indeks\_ISR

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Dari hasil perhitungan table 4.4 dengan dibantu SPSS 16 menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai VIF lebih dari 0,10. Dengan demikian, data yang diolah menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dibawah ini tabel 4.5 merupakan hasil dari pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan *SPSS 16*.

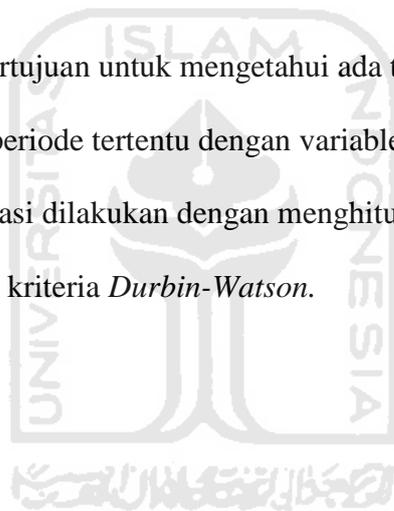


**Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dari gambar scatterplot diatas diperoleh hasil bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi homoskedastisitas pada model regresi. Oleh karena itu model regresi layak dipakai untuk prediksi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) berdasarkan masukan variabel independennya.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variable pengganggu pada periode tertentu dengan variable pengganggu periode sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai *Durbin Watson* (*DW*) statistic berdasarkan kriteria *Durbin-Watson*.



**Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.790 <sup>a</sup>	.624	.567	.14144	1.616

a. Predictors: (Constant), gaji\_DPS, umur\_DPS, reputasi\_DPS, frekuensi\_rapat\_DPS, jumlah\_DPS, rangkap\_jabatan\_DPS, tingkat\_pendidikan\_DPS

b. Dependent Variable : indeks\_ISR

Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.822 <sup>a</sup>	.675	.616	.13410	2.161

a. Predictors: (Constant), lag\_ISR, reputasi\_DPS, umur\_DPS, rangkap\_jabatan\_DPS, frekuensi\_rapat\_DPS, jumlah\_DPS, gaji\_DPS, tingkat\_pendidikan\_DPS

b. Dependent Variable: indeks\_ISR

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,616 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel  $N=54$  dan jumlah variable independen ( $K=8$ ), maka diperoleh nilai (dL) sebesar 1,28506 dan nilai (dU) sebesar 1,86234 serta (4-d) sebesar 2,384. Hasil dari uji autokorelasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif dan tidak terjadi autokorelasi negative dikarenakan nilai Durbin-Watson (d) lebih besar daripada nilai dL dan nilai (4-d) lebih besar daripada nilai dU. Untuk lebih memastikan tidak terjadinya autokorelasi positif maka dapat dilakukan metode Theil-Nagar. Theil Nagar adalah metode yang

digunakan untuk mengatasi autokorelasi dalam model regresi (Ghazali, 2011). Hasil dari metode Theil Nagar dapat dilihat pada tabel 4.5 yang menunjukkan nilai Durbin-Watson menjadi 2,161 yang berarti nilai Durbin-Watson (d) lebih dari dU sebesar 1,86234 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis persamaan linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independent tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah, frekuensi rapat, rangkap jabatan, umur, reputasi Dewan Pengawas Syariah, jumlah dan gaji Dewan Pengawas Syariah terhadap variable dependen yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR).

Persamaan Regresi Linear Berganda yang ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7$$

Dimana :

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1$   $\beta_2$  dan  $\beta_3$  : Koefesien regresi dari  $X_1, X_2, X_3$

Y : *Islamic Social Reporting* (ISR)

$X_1$  : Variabel tingkat pendidikan DPS (PDPS)

$X_2$  : Variabel frekuensi rapat DPS (RDPS)

$X_3$  : Variabel rangkap jabatan DPS

$X_4$  : Variabel umur DPS

- $X_5$  : Variabel reputasi DPS  
 $X_6$  : Variabel jumlah DPS  
 $X_7$  : Variabel gaji DPS  
 $\varepsilon$  : Kesalahan hitung (variable error)

Berikut pada Tabel 4.7 adalah hasil uji analisis regresi berganda menggunakan SPSS 16.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Koefisien<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.503	.275		-1.828	.074		
tingkat_pendidikan_DPS	-.100	.158	-.235	-.632	.530	.059	16.810
frekuensi_rapat_DPS	.129	.028	.620	4.660	.000	.461	2.168
rangkap_jabatan_DPS	-.074	.063	-.226	-1.191	.240	.227	4.406
umur_DPS	.009	.024	.048	.365	.717	.481	2.079
reputasi_DPS	.305	.135	.683	2.253	.029	.089	11.253
jumlah_DPS	-.080	.059	-.270	-1.354	.182	.206	4.860
gaji_DPS	.115	.058	.608	1.995	.052	.088	11.353

a. Dependent Variable: indeks\_ISR

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Dari Table 4.7 diatas rumus analisis linear berganda yang diperoleh dari hasil uji regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = -0,503 - 0,100X_1 + 0,129X_2 - 0,074X_3 + 0,009X_4 + 0,305X_5 - 0,080X_6 + 0,115X_7 + \varepsilon$$

Adapun penjelasan dari regresi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -0,503 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel tingkat pendidikan, frekuensi rapat, rangkap jabatan, umur, reputasi DPS,

jumlah anggota DPS dan gaji DPS maka *Islamic Social Reporting* adalah sebesar -0,503.

2. Nilai Koefisien Regresi tingkat Pendidikan DPS ( $\beta_1$ ) adalah sebesar -0,100. Tanda Negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara variabel Pendidikan Dewan Pengawas Syariah dan *Islamic Social Reporting*, atau dengan kata lain menyatakan bahwa setiap kenaikan tingkat Pendidikan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ISR sebesar 0,100 satuan.
3. Nilai Koefisien Regresi Frekuensi Rapat DPS ( $\beta_2$ ) adalah sebesar 0,129. Tanda Positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Frekuensi Rapat dan ISR, atau dengan kata lain menyatakan bahwa setiap kenaikan Frekuensi Rapat sebesar 1 satuan maka akan menaikkan ISR sebesar 0,129 satuan.
4. Nilai Koefisien Regresi Rangkap Jabatan DPS ( $\beta_3$ ) adalah sebesar -0,074. Tanda negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara variabel Rangkap Jabatan DPS dan ISR, atau dengan kata lain menyatakan bahwa setiap kenaikan Rangkap Jabatan DPS sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ISR sebesar 0,074 satuan.
5. Nilai Koefisien Regresi Umur DPS ( $\beta_2$ ) adalah sebesar 0,009. Tanda Positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Umur DPS dan ISR, atau dengan kata lain menyatakan bahwa setiap kenaikan Umur DPS sebesar 1 satuan maka akan menaikkan ISR sebesar 0,009 satuan.

6. Nilai Koefisien Regresi Reputasi DPS ( $\beta_4$ ) adalah sebesar 0,035. Tanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Reputasi DPS dan ISR, atau dengan kata lain menyatakan bahwa setiap kenaikan Reputasi DPS sebesar 1 satuan maka akan menaikkan ISR sebesar 0,035 satuan.
7. Nilai Koefisien Regresi Jumlah DPS ( $\beta_5$ ) adalah sebesar -0,080. Tanda negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara variabel Jumlah DPS dan ISR, atau dengan kata lain menyatakan bahwa setiap kenaikan Jumlah DPS sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ISR sebesar 0,080 satuan.
8. Nilai Koefisien Regresi Gaji DPS ( $\beta_2$ ) adalah sebesar 0,115. Tanda Positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Gaji DPS dan ISR, atau dengan kata lain menyatakan bahwa setiap kenaikan Gaji DPS sebesar 1 satuan maka akan menaikkan ISR sebesar 0,115 satuan.

#### 4.3.6 Uji Hipotesis

##### 4.3.6.1 Uji T-Test

Untuk menguji hubungan antara masing-masing variable independen terhadap variable dependen dilakukan pengujian linear sederhana.

Langkah-Langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut :

#### A. Merumuskan Hipotesis

$H_{01}$  : Tidak ada pengaruh tingkat pendidikan anggota DPS

- H<sub>a1</sub> : Ada pengaruh tingkat pendidikan DPS
- H<sub>02</sub> : Tidak ada pengaruh frekuensi rapat DPS
- H<sub>a2</sub> : Ada pengaruh frekuensi rapat DPS
- H<sub>03</sub> : Tidak ada pengaruh rangkap jabatan anggota DPS
- H<sub>a3</sub> : Ada pengaruh rangkap jabatan anggota DPS
- H<sub>04</sub> : Tidak ada pengaruh Umur DPS
- H<sub>a4</sub> : Ada pengaruh Umur DPS
- H<sub>05</sub> : Tidak ada pengaruh Reputasi DPS
- H<sub>a5</sub> : Ada pengaruh Reputasi DPS
- H<sub>06</sub> : Tidak ada pengaruh jumlah DPS
- H<sub>a6</sub> : Ada pengaruh jumlah DPS
- H<sub>07</sub> : Tidak ada pengaruh Gaji DPS
- H<sub>a7</sub> : Ada pengaruh Gaji DPS

B. Menentukan taraf signifikansi

Menurut Algifari (2003) tingkat signifikansi yang dipilih dalam suatu pengujian hipotesis ditentukan oleh peneliti sendiri. Penelitian pada umumnya, menggunakan tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10%. Dalam penelitian ini penulis menggunakan taraf signifikansi 10% .

C. Membandingkan taraf signifikansi dan pengambilan keputusan

1. Untuk variabel Tingkat Pendidikan DPS, karena nilai signifikan  $>$  alpha yaitu  $0,530 > 0,10$  maka menolak  $H_a$ , berarti variable PDPS secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) periode 2010-2014, berarti  $H_1$  tidak terdukung.
2. Untuk variabel Frekuensi Rapat DPS karena nilai signifikan  $<$  alpha yaitu  $0,00 < 0,10$  maka  $H_a$  diterima, berarti variable RDPS secara parsial berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) periode 2010-2014, berarti  $H_2$  terdukung.
3. Untuk variabel Rangkap Jabatan DPS karena nilai signifikan  $>$  alpha yaitu  $0,240 > 0,10$  maka menolak  $H_a$ , berarti variable RJDPS secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) periode 2010-2014, berarti  $H_3$  tidak terdukung.
4. Untuk variabel Umur DPS, karena nilai signifikan  $>$  alpha yaitu  $0,717 > 0,10$  maka menolak  $H_a$ , berarti variable RDSN secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) periode 2010-2014, berarti  $H_4$  tidak terdukung.
5. Untuk variable Reputasi DPS karena nilai signifikan  $<$  alpha yaitu  $0,029 < 0,10$  maka  $H_a$  diterima, berarti variable Reputasi DPS secara parsial berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) periode 2010-2014, berarti  $H_5$  terdukung.
6. Untuk variable Jumlah DPS karena nilai signifikan  $>$  alpha yaitu  $0,182 > 0,10$  maka menolak  $H_a$ , berarti variable Jumlah DPS secara parsial tidak

berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) periode 2010-2014, berarti  $H_6$  tidak terdukung.

7. Untuk variable Gaji DPS karena nilai signifikan  $< \alpha$  yaitu  $0,052 < 0,10$  maka  $H_a$  diterima, berarti variable Gaji DPS secara parsial berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) periode 2010-2014, berarti  $H_7$  terdukung.

#### 4.3.6.2 Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah model penelitian yang digunakan sudah baik dan layak. Kriteria model dikatakan baik, apabila *significance*  $F < \alpha$ , dalam penelitian ini  $\alpha = 0.1$ .

**Tabel 4.8 Hasil Uji F ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.526	7	.218	10.896	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.920	46	.020		
	Total	2.446	53			

a. Predictors: (Constant), gaji\_DPS, umur\_DPS, reputasi\_DPS, frekuensi\_rapat\_DPS, jumlah\_DPS, rangkap\_jabatan\_DPS, tingkat\_pendidikan\_DPS

b. Dependent Variable: indeks\_ISR

Hasil uji f dapat ditampilkan pada tabel 4.7 menunjukkan nilai *significance* F sebesar 0.000, hasil tersebut lebih kecil dibandingkan  $\alpha = 0.1$ , maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini sudah baik dan layak untuk digunakan.

## 4.4 Pembahasan

### 4.4.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR (Y)

Hipotesis satu menyatakan bahwa tingkat pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y) ditolak dengan kriteria persamaan regresi *coefficients* tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah bernilai negatif yaitu sebesar -0.0100. Hal tersebut berarti, jika tingkat pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah mengalami peningkatan maka pengungkapan *Islamic Social Reporting* mengalami penurunan. Kompetensi dari anggota dewan pengawas syariah dapat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dari anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut diharapkan semakin kompeten anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut dalam melakukan tugasnya. Banyak aspek yang dapat mengatur tingkat kompetensi ini, tingkat pendidikan diyakini dapat mempengaruhi kompetensi dari anggota Dewan Pengawas Syariah khususnya dari pengetahuan akademik yang dimiliki.

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan tidak signifikannya antara tingkat pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan pengungkapan ISR. Probabilitas dari variabel ini adalah sebesar 0.530. Hal ini mendukung penelitian Rosiana (2015) yang menunjukkan bahwa *Islamic Governance Score* yang diukur dengan jumlah, *cross membership*, latar belakang pendidikan, dan reputasi dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini dapat terjadi karena gelar tingkat pendidikan yang dimiliki oleh

dewan pengawas syariah tersebut beragam bidangnya, belum tentu dalam bidang akuntansi yang mengakibatkan tidak semuanya mengerti teori dan praktik-praktik mengenai pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Hanya beberapa perbankan syariah yang memiliki anggota dewan pengawas syariah dengan tingkat pendidikan yang tinggi dengan gelar S3. Misalnya pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) terdapat 2 anggota dari beberapa Dewan Pengawas Syariah yang memiliki gelar pendidikan S3. Perbankan syariah dan unit usaha syariah yang selain disebutkan sebelumnya hanya memiliki tidak lebih dari 1 anggota Dewan Pengawas Syariah dengan gelar pendidikan S3. Dugaan lain, sama seperti variabel independen lainnya yang tidak signifikan, hubungan yang tidak signifikan ini antara lain dipengaruhi oleh sedikitnya atau terbatasnya data yang diperoleh dan diolah untuk menguji hubungan variabel ini dengan variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

#### **4.4.2 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR (Y)**

Hipotesis dua menyatakan bahwa frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) diterima dengan kriteria persamaan regresi *coefficients* frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah bernilai positif yaitu sebesar 0.029. Hal tersebut berarti, jika Dewan Pengawas Syariah banyak melakukan rapat maka pengungkapan ISR juga mengalami peningkatan. Frekuensi rapat yang lebih banyak untuk membahas dan

kemudian memberikan opini-opini kepada pihak perbankan dalam hal mengungkapkan pertanggungjawaban sosial (ISR) akan meningkatkan kepercayaan publik. Secara logika, semakin sering rapat dilaksanakan, maka semakin bagus pengawasan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilaksanakan. Pengungkapan merupakan salah satu cara untuk memberikan suatu transparansi kepada para *stakeholder*. Frekuensi rapat yang dilakukan oleh para Dewan Pengawas Syariah pada tiap perbankan dan unit usaha syariah berbeda-beda. Misalnya, pada perbankan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) frekuensi rapat pernah dilakukan lebih dari 20 kali dalam setahun. Dan perbankan selain diatas seperti Bank Central Asia Syariah (BCAS), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Bukopin, Bank Mega Syariah (BMS), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Panin, Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah (BTPNS), Bank Pembangunan Daerah Jabar, Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) frekuensi rapat yang dilakukan setiap tahunnya yaitu 11-20 kali rapat Dewan Pengawas Syariah. Hasil pengujian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan (2014) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Chariri (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

#### **4.4.3 Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR (Y)**

Hipotesis tiga menyatakan bahwa rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR (Y) ditolak dengan kriteria nilai *t Stat* sebesar -1.191, nilai tersebut lebih besar dibandingkan  $\alpha = 0.1$ . Hal tersebut berarti rangkap jabatan tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah.

Di Indonesia rangkap jabatan belum terlalu detail diatur dalam peraturan yang berlaku. Aturan mengenai rangkap jabatan hanya menunjukkan ketidakbolehan Dewan Pengawas Syariah untuk memiliki benturan kepentingan atas rangkap jabatan tersebut. Rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah diharapkan mampu meningkatkan kompetensi Dewan Pengawas Syariah tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi opini bagi pihak perbankan menyajikan laporan pertanggungjawaban sosialnya. Hal tersebut dikarenakan dewan pengawas syariah yang memiliki reputasi baik bukan hanya dapat digunakan oleh perbankan yang memiliki prospek dan ketaatan pengungkapan yang tinggi, tetapi dapat pula digunakan oleh perbankan yang memiliki prospek dan ketaatan pengungkapan yang kurang tinggi. Perbankan Bukopin dan Syariah Mandiri (BSM) memiliki lebih dari 1 anggota dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan juga sebagai dewan pengawas syariah di perbankan atau lembaga lainnya. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah (BMS), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Panin, Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah (BTPNS) hanya memiliki

1 anggota yang merangkap jabatan juga sebagai Dewan Pengawas Syariah di perbankan atau lembaga lainnya. Bank Central Asia Syariah (BCAS), Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) para anggota Dewan Pengawas Syariah tidak ada yang memiliki rangkap jabatan pada perbankan atau lembaga lainnya. Ini menunjukkan 81% dari anggota Dewan Pengawas Syariah yang merangkap jabatan.

Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Abdullah et al, 2011 dalam Rizkiningsih, 2012 yang menunjukkan adanya pengaruh positif ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan di Indonesia. Merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah pada beberapa institusi finansial islam termasuk dalam ukuran dewan pengawas syariah dalam penelitian tersebut.

#### **4.4.4 Pengaruh Umur Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR (Y)**

Hipotesis empat menyatakan bahwa Umur Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) diterima, dengan kriteria persamaan regresi *coefficients* Umur Dewan Pengawas Syariah bernilai positif yaitu sebesar 0.009 dan nilai *t Stat* sebesar 0.365, namun nilai *sig* sebesar 0.717, nilai tersebut lebih besar dibandingkan  $\alpha = 0.1$ . Hal

tersebut berarti, jika umur Dewan Pengawas Syariah mengalami peningkatan maka pengungkapan *Islamic Social Reporting* mengalami penurunan.

Kompetensi dari dewan pengawas syariah, dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh umurnya. Semakin tua umur dari dewan pengawas syariah maka diyakini semakin kompeten dirinya dalam perannya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Umur yang semakin tua menunjukkan semakin berpengalaman anggota tersebut. Semakin tua umur dewan pengawas syariah menunjukkan semakin banyak pengalaman yang dipunyai khususnya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Hal ini sangat mempengaruhi kompetensi dari dewan pengawas syariah yang mempengaruhi keefektifan dari pengawasan tersebut, khususnya dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting* pada *annual report* perbankan. Umur jelas belum cukup untuk menjelaskan mengenai praktik pengawasan pelaksanaan syariah oleh dewan pengawas syariah di perbankan.

#### **4.4.5 Pengaruh Reputasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR (Y)**

Hipotesis lima menyatakan bahwa reputasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) diterima, dengan kriteria persamaan regresi *coefficients* reputasi Dewan Pengawas Syariah bernilai positif yaitu sebesar 0.305 dan nilai *t Stat* sebesar 2.253, nilai tersebut lebih besar dibandingkan  $t_{tabel}$  atau  $2.253 > 2.01290$ . Hal tersebut berarti, jika reputasi Dewan Pengawas Syariah mengalami peningkatan maka nilai perusahaan juga mengalami peningkatan. Reputasi Dewan Pengawas Syariah

berkemungkinan besar mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan tersebut akan lebih baik dan sebaliknya. Terkait dengan kompetensi yang dinilai dengan reputasi Dewan Pengawas Syariah dalam keanggotaan di Dewan Syariah Nasional yang dimiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menunjang profesi perkerjaan sebagai pengawas syariah dan tentu saja memiliki kompetensi pengetahuan yang lebih dibanding anggota yang tidak memiliki reputasi dewan syariah nasional mengenai pengungkapan-pengungkapan apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak perbankan. Dari pelaporan yang dilakukan perbankan akan menimbulkan dampak positif untuk kepercayaan publik. Hal ini tentunya memperkuat kompetensi dari anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut.

Hampir semua perbankan dan unit usaha syariah yang dijadikan sampel pada penelitian ini beranggotakan dewan pengawas syariah dengan reputasi Dewan Pengawas Syariah. Misalnya pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah (BTPNS) semua anggota dewan pengawas syariah memiliki reputasi Dewan Pengawas Syariah. Dari data-data pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perbankan tersebut pun lebih baik dan lebih luas. Pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) beranggotakan dewan pengawas syariah tidak memiliki reputasi Dewan Syariah Nasional, namun tidak menjadikan pengungkapan *Islamic Social Reporting* menjadi kurang baik. Dapat dikatakan reputasi Dewan Syariah Nasional bagi para anggota Pengawas Syariah merupakan nilai tambah dalam bidang profesi kerjanya.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Rosiana (2015) yang menunjukkan bahwa *Islamic Governance Score* yang diukur dengan reputasi dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

#### **4.4.6 Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan ISR (Y)**

Hipotesis enam menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y) ditolak, dengan kriteria persamaan regresi *coefficients* jumlah dewan pengawas syariah bernilai negatif yaitu sebesar -0.080 dan nilai *t Stat* sebesar -1.354, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan  $t_{tabel}$  atau  $-1.354 < 2.0190$ , selain itu nilai *sig* sebesar 0.182, nilai tersebut lebih besar dibandingkan  $\alpha = 0.1$ . Hal tersebut berarti, jika jumlah dewan pengawas syariah mengalami peningkatan maka pengungkapan *Islamic Social Reporting* mengalami penurunan. Dewan pengawas syariah mempunyai fungsi yang penting dalam perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Semakin besar ukuran dewan pengawas syariah, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan *Islamic social reporting* akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh perbankan. Hal ini karena Dewan Pengawa Syariah mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat,

infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* perusahaan.

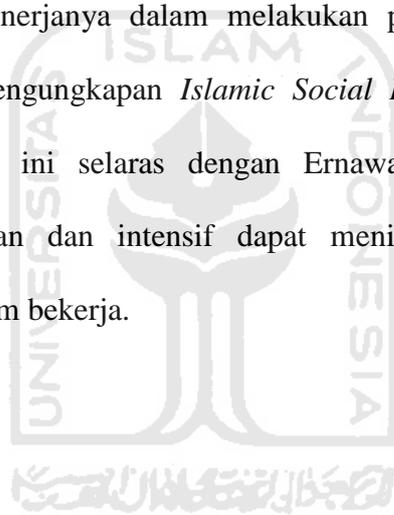
Hasil pengujian ini selaras dengan penelitian Khoirudin (2013) yang menyatakan bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia. Dan bertolak belakang dengan penelitian Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa *Islamic Governance* (sebagai proksi *corporate governance* di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam variabel *Islamic Governance* tersebut dibahas mengenai jumlah dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan level pengungkapan.

#### **4.4.7 Pengaruh Gaji Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR (Y)**

Hipotesis tujuh menyatakan bahwa gaji dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR (Y) diterima, dengan kriteria persamaan regresi *coefficients* gaji dewan pengawas syariah bernilai positif yaitu sebesar 0.115 dan nilai *t Stat* sebesar 1.995, selain itu nilai *sig* sebesar 0.052, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan  $\alpha = 0.1$ . Hal tersebut berarti, jika gaji dewan pengawas syariah mengalami peningkatan maka pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga mengalami peningkatan. Salah satu cara meningkatkan semangat kerja tenaga kerja dalam suatu perusahaan adalah melalui gaji atau kompensasi. Dengan demikian maka setiap perusahaan harus dapat menetapkan gaji atau

kompensasi yang paling tepat, sehingga dapat menopang tercapainya tujuan perusahaan secara lebih efektif dan lebih efisien.

Pengertian tepat pada masalah ini bukan hanya terbatas pada jumlahnya, tetapi masih banyak faktor-faktor lainnya yang harus dipertimbangkan. Faktor-faktor diatas yang perlu diperhatikan oleh perbankan dalam menetapkan atau memberikan gaji atau kompensasi yang tepat bagi sumber daya perbankannya. Semakin baik gaji yang diberikan kepada dewan pengawas syariah diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan syariah dan meningkatkan kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang semakin meluas. Hasil penelitian ini selaras dengan Ernawati dan Ibrahim (2014) pemberian gaji, tunjangan dan intensif dapat menimbulkan semangat dan kegairahan karyawan dalam bekerja.



Tabel 4.9

## Hasil Ringkasan Pengujian Hipotesis

Hipotesis		Nilai $\beta$	Nilai Sig.	Keputusan
Ha1	Tingkat pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>ISR</i>	-0.100	0.074	Ha1 ditolak
Ha2	Frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>ISR</i>	0.129	0.000	Ha2 diterima
Ha3	Rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>ISR</i>	-0.074	0.240	Ha3 ditolak
Ha4	Umur DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>ISR</i>	0.009	0.717	Ha4 ditolak
Ha5	Reputasi DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>ISR</i>	0.305	0.029	Ha5 diterima
Ha6	Jumlah DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>ISR</i>	-0.080	0.182	Ha6 ditolak
Ha7	Gaji DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>ISR</i>	0.115	0.052	Ha7 diterima

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Adapun simpulan dari hasil analisis pengujian penelitian Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) pada perbankan Syariah di Indonesia yang dibuktikan berdasarkan persamaan regresi *coefficients* tingkat pendidikan bernilai negatif yaitu sebesar -0.100.
2. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) pada perbankan Syariah di Indonesia yang dibuktikan berdasarkan persamaan regresi *coefficients* frekuensi rapat bernilai positif yaitu sebesar 0.129.
3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) pada perbankan Syariah di Indonesia yang dibuktikan berdasarkan persamaan regresi *coefficients* rangkap jabatan bernilai negatif yaitu sebesar -0.074.
4. Umur Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) pada

perbankan Syariah di Indonesia yang dibuktikan berdasarkan nilai *sig* 0.717, nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha 0.10.

5. Reputasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) pada perbankan Syariah di Indonesia yang dibuktikan berdasarkan persamaan regresi *coefficients* frekuensi rapat bernilai positif yaitu sebesar 0.305.
6. Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) pada perbankan Syariah di Indonesia yang dibuktikan berdasarkan persamaan regresi *coefficients* rangkap jabatan bernilai negatif yaitu sebesar -0.080.
7. Gaji Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) pada perbankan Syariah di Indonesia yang dibuktikan berdasarkan persamaan regresi *coefficients* frekuensi rapat bernilai positif yaitu sebesar 0.115.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dari penelitian “Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)”, sebagai berikut:

1. Karena penelitian pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* termasuk penelitian baru di Indonesia, menyebabkan peneliti terbatas dalam memperoleh jurnal dan

referensi terdahulu untuk digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan penelitian ini.

2. Subjektif dalam menilai pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang terdapat di *annual report* sebab tidak ada pedoman yang baku dan detail untuk menangkap yang ada di *annual report*.
3. *Annual report* pada bank syariah yang tersedia di internet terbatas sehingga jangka waktu penelitian ini relatif pendek yaitu hanya selama 5 tahun saja (2010-2014).

### 5.3 Saran

Melalui hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran untuk memperbaiki keterbatasan penelitian, sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperoleh dan menambah jurnal atau referensi yang lebih luas, tidak hanya jurnal atau referensi yang ada di Indonesia tetapi juga pada jurnal atau referensi Internasional.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya memahami informasi yang terdapat di *annual report* dengan lebih teliti yaitu pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* agar tidak salah dalam menangkap informasi yang diberikan.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah periode *annual report* yang diteliti, tidak hanya memperoleh data dari internet tetapi memperluasnya dengan mendapatkan langsung dari bank-bank yang akan diteliti.

## **5.4 Implikasi Penelitian**

### **5.4.1 Bagi Bank Syariah di Indonesia**

Perbankan syariah sebaiknya makin menyadari pentingnya karakteristik dewan pengawas syariah dan pengungkapan sosial dalam laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia karena perbankan syariah tidak hanya memiliki fungsi bisnis tetapi juga fungsi sosial. Mengingat fungsi dari dewan pengawas syariah yaitu mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah, juga pengawasan terhadap manajemen kaitannya dengan implementasi sistem dan produk dalam perbankan syariah dan ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai islam di lingkungan perusahaan. Untuk memenuhi fungsi tersebut diharapkan para dewan pengawas syariah lebih meningkatkan kompetensi dirinya dalam bidang kerjanya. Perbankan syariah didirikan dan dikembangkan untuk memenuhi fungsi bisnis dan sosialnya. Laporan terkait informasi *good corporate governance* dan pengungkapan sosial sebaiknya dipaparkan secara tersendiri dan detail sehingga kinerja dewan pengawas syariah serta pendanaan dan penyaluran aktivitas sosial dapat diketahui publik serta pemakai laporan keuangan yang diharapkan dapat menambah kualitas perbankan syariah di Indonesia lebih baik.

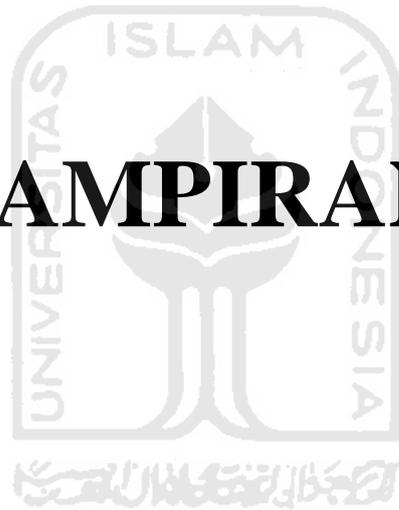
## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010). *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*.
- Agustianto, M. (2008). Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2). Artikel dipublikasikan melalui situs [http://agustianto.niriah.com/2008/04/25\\_/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-2/](http://agustianto.niriah.com/2008/04/25_/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-2/)
- Akhtaruddin, M. (2005). Corporate Mandatory Disclosure Practices in Bangladesh. *The International Journal of Accounting*, 40.
- Algifari. (2003). *Statistika Induktif untuk Ekonmi dan Bisnis*. AM YKPN. Yogyakarta.
- Assegaf, Y. U., Falikhatun, & Wahyuni, S. (2012). Bank Syariah Di Indonesia: Corporate Governance Dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (Islamic Social Responsibility Disclosure) . *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*.
- Chairi, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan penerbit UNDIP.
- Chariri, Charles. (2012). Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Asia). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2012.
- Ernawati, T., & Ibrahim, M. (2014). Analisis Implementasi Kompensasi Karyawan PT. LOTTE Shopping Indonesia Cabang Pekanbaru. *Jom FISIP Volume 1* .
- Farook, S. Z., & Lanis, R. (2005). “Banking on Islam? Determinants of CSR Disclosure”. *International Conference on Islamic Economics and Finance*.
- Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam Dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative Indeks* Dan *Islamic Social Reporting Indeks*. *Symposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniffa, R. (2002). *Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*. *Indonesian Management and Accounting Research* 1 (2).
- Haryani, R. A. (2015). Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan *Intellectual Capital* Terhadap *Corporate Social Responsibility* Pada Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*.

- Jannah, A. M., & Asrori. (2016). Pengaruh *GCG, Size* , Jenis Produk Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan ISR. *Accounting Analysis Journal*.
- Khasanah, Z., & Yulianto, A. (2015). *Islamic Corporate Governance* Dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah. *Accounting Analysis Journal*.
- Khoirudin, Amirul. (2013). *Corporate Governance* Dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*.
- Marharani, A. K., & Yulianto, A. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah. *Accounting Analysis Journal*.
- Masykuroh, E. (t.thn.). Eksistensi DPS Dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan, Kinerja Keuangan Dan Pengungkapan CSR Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*.
- Mubarok, J. (2012). Peran Dewan Syariah Nasional-MUI Dan Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Bisnis Syariah/Lembaga Keuangan Syariah. Artikel dipublikasikan melalui situs <http://majelispengulis.blogspot.co.id/2012/05/peran-dewan-syariah-nasional.html>
- Muhammad. (2005). Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, R. (2010). Persepsi User dan Preparer Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Sosial Perbankan Islam di Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 14(2).
- Ningrum, R. A., Fachrurrozie, & Jayanto, P. Y. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR. *Accounting Analysis Journal*.
- Othman, R., Thani, A. Md., & Ghani, E. K. (2009). *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah -Approved Companies in Bursa Malaysia*. *Research Journal of International Studies*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- Prasetyoningrum, A. K. (2010). Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Aset*.
- R.D, I. G. (2014). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*.

- Rahayu, R. S., & Cahyati, A. D. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perbankan Syariah. *JRAK*.
- Rahmawati, N. (2012). Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Syari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syaria'ah & Bisnis Islam*.
- Rizkiningsih, Priyesta. (2012). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* : Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Negara-negara *Gulf Cooperation Council*. Skripsi Universitas Indonesia Depok.
- Rosiana, R., Arifin, B., & Hamdani, M. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Islamic Governance Score* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Shiddieqoh, N. (2014). Analisa Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Kospin Jasa syariah Pekalongan. *Skripsi* .
- Schuler dan Huber, (1993) dalam skripsi Angih Wanabakti Pabisangan (2011) dan Nelman Dwihardo Horansil (2011) “Pengaruh Pelatihan , Penerapan SOP, Reward System, Lingkungan Kerja dan Peralatan Terhadap Produktivitas Teknisi (Studi Kasus pada Bengkel Toyota Urip PT. Hadji Kalla Makassar)”
- Sudarsono, H. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi Keempat. Yogyakarta: Ekonisia.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No : Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional.
- Surat Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI)
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Umam, K. (2016). Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Skripsi*.
- Widayuni, Nisrina & Puji Harto. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.

# LAMPIRAN



Lampiran 1 Daftar Indeks *Islamic Social Reporting*

No	Kemungkinan informasi penting untuk diungkapkan	Sumber
<b>I</b>	<b>Tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah)</b>	
1	Nama dan anggota DPS dan kualifikasinya	
2	Ruang lingkup pekerjaan dan penyesuaian terhadap ketentuan hukum	
3	Review/lingkup pemeriksaan	
4	Opini terhadap hasil pemeriksaan	
5	Rekomendasi untuk perbaikan	
6	Tanda tangan anggota DPS	
7	Gaji/Remunerasi DPS	
<b>II</b>	<b>Informasi Produk dan Jasa</b>	
1	Informasi mengenai Produk dan jasa baru	
2	Persetujuan produk baru dari DPS	
3	Daftar/definisi produk yang ditawarkan	
4	Informasi umum dari kegiatan investasi	
5	Informasi umum dari kegiatan pembiayaan	
<b>III</b>	<b>Pengelolaan Dana Zakat</b>	
1	Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat	
2	Saldo dana zakat dan alasan belum didistribusikannya	
3	pengesahan mengenai perhitungan dan distribusi dana zakat	
<b>IV</b>	<b>Pinjaman Qardh al-Hasan</b>	
1	Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman Qardh	
2	Sumber dana yang dialokasikan untuk Qardh	
3	Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat	
<b>V</b>	<b>Kegiatan Amal dan Sosial</b>	
1	Sifat kegiatan amal dan sosial	
2	Jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan ini	
3	Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini	
<b>VI</b>	<b>Transaksi yang melanggar hukum (Haram)</b>	
1	Alasan untuk menjalankan transaksi tersebut	
2	Jumlah pendapatan atau beban dari transaksi ini	
3	Kebijakan bank untuk menerima dan menyalurkan dana non-halal	

<b>VII</b>	<b>Tanggung jawab kepada Karyawan</b>	
1	Kebijakan gaji, pemberian upah dan kesejahteraan lainnya	
2	Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan	
3	Kebijakan kesempatan yang sama diantara karyawan	
4	Kebijakan di lingkungan kerja	
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	
6	Apresiasi terhadap karyawan	
7	Penghargaan karyawan (Bonus,dll)	
<b>VIII</b>	<b>Tanggung jawab kepada Masyarakat</b>	
1	Menciptakan kesempatan kerja	
2	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat	
3	Mensponsori kegiatan masyarakat	
4	Pernyataan komitmen untuk peran sosial	
5	Partisipasi pada konferensi/seminar tentang ekonomi syariah	
6	Magang untuk mahasiswa	
<b>IX</b>	<b>Aspek Pengembangan Komunitas Masyarakat</b>	
1	Peran bank pada perkembangan ekonomi	
2	Peran bank dalam menangani masalah sosial	
3	Peran bank dalam menangani pengembangan pendidikan dan sponsor	
4	Peran bank dan komitmen untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro dan kecil	
<b>X</b>	<b>Keterlambatan pembayaran oleh klien dan masalah klien</b>	
1	Kebijakan dalam menangani klien yang memiliki masalah	
2	Jumlah yang dibebankan sebagai pinalti/denda, jika ada	
3	Opini Syariah mengenai diperbolehkannya membebaskan biaya tambahan (seperti : pinalti/denda)	
4	Pengakuan pembayaran pinalti/denda sebagai sumber pendapatan lain	

Lampiran 2 Definisi Indeks *Islamic Social Reporting*

No	Indeks ISR	Pengertian
1	Aktivitas Riba	Aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah islam meliputi pendapatan non halal yang didapat dari pendapatan maupun beban bunga pada bank konvensional
2	Gharar	Aktivitas yang mengandung ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi
3	Zakat	Besarnya sejumlah harta yang dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4	Kebijakan mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent client</i>	Kebijakan perusahaan dalam menangani pelanggan atau nasabah yang mengalami kebangkrutan
5	<i>Current Value Balance Sheet</i>	Laporan posisi keuangan perusahaan pada tiap tahunnya
6	<i>Value Added Statement</i>	Laporan nilai tambah yang memberikan informasi tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah yang akan didistribusikan
7	Status halal atau syariah dalam produk	Menjelaskan tiap-tiap produk baik produk pembiayaan maupun pendanaan yang ditawarkan
8	Pengembangan produk	Usaha bank untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mengembangkan serta menambahkan produk-produknya
9	Peningkatan pelayanan	Usaha dalam peningkatan pelayanan terhadap pelanggan
10	Keluhan pelanggan atau kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku	Pengaduan yang disebabkan oleh ketidakpuasan pelanggan akan pelayanan dan kejadian yang terjadi karena ketidaktaatan pelanggan seperti keterlambatan dalam pembayaran serta denda yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya tunggakan
11	Karakteristik pekerjaan	Gambaran mengenai lingkungan pekerjaan dalam perusahaan, meliputi jumlah pekerja serta kebijakan untuk para karyawan
12	Pendidikan dan pelatihan	Program pendidikan serta kepelatihan yang ditujukan karyawan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, serta jenjang karir karyawan
13	Kesempatan yang sama	Karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan reward, punishment, kepelatihan serta pengembangan karir
14	Kesehatan dan keselamatan Kerja	Kebijakan perusahaan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja untuk karyawan
15	Lingkungan kerja	Gambaran mengenai lingkungan tempat bekerja untuk karyawan
16	Perekrutan khusus	Program penyaluran sumber daya manusia yang dilakukan dengan khusus, seperti kerjasama dengan sebuah lembaga pendidikan

17	Shodaqoh atau donasi	Jumlah shadaqah atau donasi yang digunakan untuk kegiatan sosial
18	Wakaf	Jumlah pemberian wakaf yang digunakan untuk kegiatan sosial
19	Qard Hasan	Dana kebajikan yang diperoleh dari denda, pendapatan non halal, dan shodaqoh yang digunakan untuk kegiatan sosial
20	Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah	Jumlah zakat maupun sumbangan berupa infaq dan lain sebagainya dari dalam bank maupun luar (nasabah)
21	Pendidikan	Memberikan bantuan dalam bentuk pinansial maupun non finansial untuk menunjang sarana dan prasarana dibidang pendidikan
22	Bantuan kesehatan	Memberikan bantuan finansial maupun non finansial untuk kesehatan
23	Pemberdayaan ekonomi	Memberikan bantuan untuk mengembangkan ekonomi suatu daerah
24	Kepedulian terhadap anak Yatim	Memberikan bantuan finansial maupun non finansial kepada anak yatim piatu
25	Pembangunan atau renovasi Masjid	Memberikan bantuan finansial maupun non finansial untuk masjid
26	Kegiatan kepemudaan	Memberikan bantuan atau sponsor dalam berbagai kegiatan kepemudaan suatu daerah
27	Kegiatan sosial lainnya	Mengadakan, memberikan bantuan atau mendukung kegiatan sosial lainnya
28	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dll	Memberikan bantuan serta dukungan untuk sebuah acara sosial
29	Kampanye go green	Melakukan kampanye maupun sosialisasi tentang lingkungan
30	Konservasi lingkungan	Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup
31	Perlindungan terhadap flora fauna liar yang terancam punah	Memberikan bantuan ataupun melakukan upaya atau kegiatan dalam rangka melindungi flora fauna yang terancam punah
32	Polusi	Melakukan kegiatan serta upaya dalam mengurangi maupun membasini polusi di lingkungan sekitar
33	Perbaikan dan pembuatan sarana umum	Memberikan bantuan atau melakukan perbaikan serta pembuatan sarana untuk umum
34	Audit lingkungan	Memberikan penilaian serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
35	Kebijakan manajemen lingkungan	Kebijakan manajemen dalam menjaga kelestarian lingkungan
36	Profil dan strategi organisasi	Sejarah singkat maupun strategi yang dilakukan untuk masa depan perusahaan
37	Struktur organisasi	Struktur organisasi dalam suatu perusahaan
38	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris	Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris
39	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi	Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
40	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	Uraian mengenai kelengkapan komite serta pelaksanaan tugas masing-masing komite
41	Pelaksanaan tugas dan	Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan

	tanggungjawab dewan pengawas syariah	tanggungjawab dewan pengawas syariah
42	Penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Uraian mengenai penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
43	Penanganan benturan kepentingan	Uraian mengenai transaksi atau penanganan benturan kepentingan
44	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	Uraian mengenai fungsi kepatuhan bank
45	Penerapan fungsi audit internal	Uraian mengenai penerapan fungsi audit internal
46	Penerapan fungsi audit eksternal	Uraian mengenai penerapan fungsi audit eksternal
47	Batas maksimum penyaluran dana	Uraian mengenai batas maksimum dalam penyaluran dana
48	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Uraian mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
49	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya	Uraian mengenai adanya kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
50	Etika perusahaan	Uraian mengenai etika, kode etik perusahaan ( <i>Code of Conduct</i> )

### Lampiran 3 Populasi dan Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah	Kriteria Sampel	
		1	2
1	Bank Syariah Mandiri	√	√
2	Bank Muamalat Indonesia	√	√
3	BNI Syariah	√	√
4	BRI Syariah	√	√
5	Bank Mega Syariah	√	√
6	Bank Jabar Banten Syariah	√	√
7	Panin Bank Syariah	√	√
8	Bank Syariah Bukopin	√	√
9	Bank Victoria Syariah	-	-
10	BCA Syariah	√	√
11	Maybank Syariah	-	-
12	BTPN Syariah	√	√

### Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	BCA Syariah
2	BNI Syariah
3	BRI Syariah
4	Bank Syariah Bukopin
5	Bank Syariah Mandiri
6	Bank Mega Syariah
7	Bank Muamalat Indonesia
8	Panin Bank Syariah
9	BTPN Syariah
10	Bank Jabar Banten Syariah



## Lampiran 4 Hasil input data sampel pada excel

No	Nama Bank	Tahun	Indeks ISR	TPDPS	FRDPS	RJDPS	UDPS	RDSN	JDPS	GDP S
1	BCAS	2011	0,53	1	2	0	2	1	2	2
2		2012	0,64	1	2	0	2	1	2	2
3		2013	0,53	1	2	0	2	1	2	2
4		2014	0,60	1	2	0	2	1	2	2
5	BNIS	2010	0,62	1	3	1	2	0	2	3
6		2011	0,60	1	2	1	2	0	2	3
7		2012	0,58	1	2	1	2	0	2	3
8		2013	0,51	1	2	1	2	0	2	3
9		2014	0,60	1	0	1	2	0	2	3
10	BRIS	2010	0,62	2	2	1	3	2	3	3
11		2011	0,62	2	3	1	3	2	3	3
12		2012	0,51	2	2	1	3	2	3	3
13		2013	0,64	2	2	1	3	2	3	3
14		2014	0,51	2	2	1	3	2	3	3
15	BUKOPIN	2010	0,51	2	2	2	2	1	3	3
16		2011	0,51	2	0	2	2	1	3	3
17		2012	0,67	2	2	2	2	1	3	3
18		2013	0,67	2	2	2	2	1	3	3
19		2014	0,58	2	2	1	2	1	3	3
20	BSM	2010	0,60	2	2	2	2	2	3	3
21		2011	0,67	2	2	2	3	2	3	3
22		2012	0,67	2	1	2	3	2	3	3
23		2013	0,18	2	0	2	3	2	3	3
24		2014	0,18	2	0	2	3	2	3	3
25	BMEGAS	2010	0,49	2	0	1	3	1	3	2
26		2011	0,42	2	2	1	2	1	3	2
27		2012	0,47	2	2	1	2	1	3	2
28		2013	0,64	2	2	1	2	1	3	2
29		2014	0,51	2	2	1	2	1	3	2
30	BMI	2010	0,60	2	2	1	3	1	3	3
31		2011	0,53	2	2	1	3	1	3	3
32		2012	0,69	2	2	1	3	1	3	3
33		2013	0,60	2	2	1	3	1	3	3
34		2014	0,69	2	2	1	3	1	3	3
35	PANIN	2010	0,24	1	0	1	2	0	2	3
36		2011	0,24	1	0	1	2	0	2	3
37		2012	0,29	1	0	1	2	0	2	3

No	Nama Bank	Tahun	Indeks ISR	TPDPS	FRDPS	RJDPS	UDPS	RDSN	JDPS	GDP S
38		2013	0,47	1	2	1	2	0	2	3
39		2014	0,44	1	2	1	2	0	2	3
40	BTPN	2010	0,40	1	1	1	3	0	2	2
41		2011	0,00	1	0	1	3	0	2	2
42		2012	0,00	1	0	1	3	0	2	2
43		2013	0,00	1	0	1	3	0	2	2
44		2014	0,00	1	0	1	3	0	2	2
45	BPD JABAR	2010	0,11	1	0	0	2	1	3	0
46		2011	0,09	1	0	0	2	1	3	0
47		2012	0,44	1	0	0	2	1	3	0
48		2013	0,00	1	0	0	2	1	3	0
49		2014	0,00	1	0	0	2	1	3	0
50	BTNS	2010	0,40	1	0	0	0	0	3	0
51		2011	0,40	1	0	0	0	0	3	0
52		2012	0,42	1	0	0	0	0	3	0
53		2013	0,42	1	0	0	0	0	3	0
54		2014	0,51	1	0	0	0	0	3	0

## Lampiran 5 Daftar Output SPSS

## Hasil Uji Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
tingkat_pendidikan_DPS	54	1.00	2.00	1.4630	.50331
frekuensi_rapat_DPS	54	.00	3.00	1.1852	1.02927
rangkap_jabatan_DPS	54	.00	2.00	.9074	.65209
umur_DPS	54	.00	3.00	1.4444	1.17629
reputasi_DSN	54	2.00	3.00	2.6481	.48203
jumlah_DPS	54	.00	2.00	.8148	.72876
gaji_DPS	54	.00	3.00	2.1852	1.13394
indeks_ISR	54	.00	.69	.4419	.21483
Valid N (listwise)	54				

## Hasil Uji Normalitas Data

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	54
Normal Parameters <sup>a</sup>	
Mean	.0000000
Std. Deviation	.13176658
Most Extreme Differences	
Absolute	.137
Positive	.137
Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z	1.005
Asymp. Sig. (2-tailed)	.265

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Hasil Uji Multikolinearitas

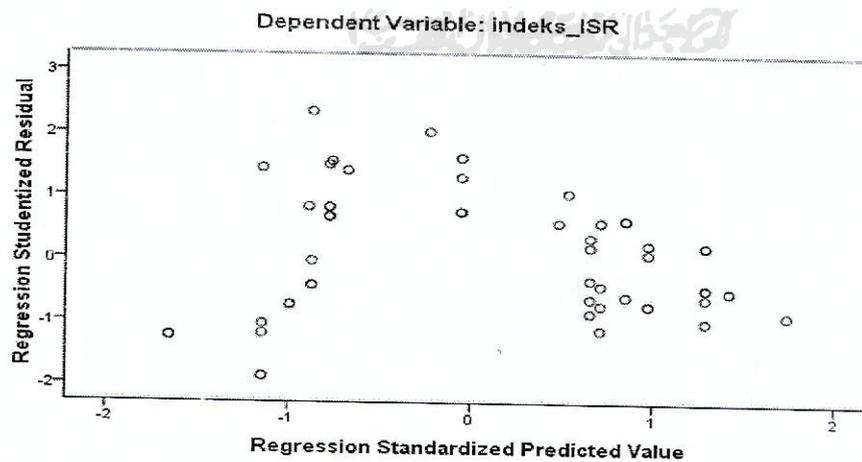
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.503	.275		-1.828	.074		
tingkat_pendidikan_DPS	-.100	.158	-.235	-.632	.530	.059	16.810
frekuensi_rapat_DPS	.129	.028	.620	4.660	.000	.461	2.168
rangkap_jabatan_DPS	-.074	.063	-.226	-1.191	.240	.227	4.406
umur_DPS	.009	.024	.048	.365	.717	.481	2.079
reputasi_DSN	.305	.135	.683	2.253	.029	.089	11.253
jumlah_DPS	-.080	.059	-.270	-1.354	.182	.206	4.860
gaji_DPS	.115	.058	.608	1.995	.052	.088	11.353

a. Dependent Variable: indeks\_ISR

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



### Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.790 <sup>a</sup>	.624	.567	.14144	1.616

a. Predictors: (Constant), gaji\_DPS, umur\_DPS, reputasi\_DSN, frekuensi\_rapat\_DPS, jumlah\_DPS, rangkap\_jabatan\_DPS, tingkat\_pendidikan\_DPS

b. Dependent Variable: indeks\_ISR

### Hasil uji Theil-Nagar

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.822 <sup>a</sup>	.675		.616	2.161

a. Predictors: (Constant), lag\_ISR, reputasi\_DSN, umur\_DPS, rangkap\_jabatan\_DPS, frekuensi\_rapat\_DPS, jumlah\_DPS, gaji\_DPS, tingkat\_pendidikan\_DPS

b. Dependent Variable: indeks\_ISR

### Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.503	.275		1.828	.074		
tingkat_pendidikan_DPS	-.100	.158	-.235	-.632	.530	.059	16.810
frekuensi_rapat_DPS	.129	.028	.620	4.660	.000	.461	2.168
rangkap_jabatan_DPS	-.074	.063	-.226	1.191	.240	.227	4.406
umur_DPS	.009	.024	.048	.365	.717	.481	2.079
reputasi_DSN	.305	.135	.683	2.253	.029	.089	11.253
jumlah_DPS	-.080	.059	-.270	1.354	.182	.206	4.860
gaji_DPS	.115	.058	.608	1.995	.052	.088	11.353

a. Dependent Variable: indeks\_ISR

## Hasil Uji T

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.503	.275		-1.828	.074
tingkat_pendidikan_DPS	-.100	.158	-.235	-.632	.530
frekuensi_rapat_DPS	.129	.028	.620	4.660	.000
rangkap_jabatan_DPS	-.074	.063	-.226	-1.191	.240
umur_DPS	.009	.024	.048	.365	.717
reputasi_DSN	.305	.135	.683	2.253	.029
jumlah_DPS	-.080	.059	-.270	-1.354	.182
gaji_DPS	.115	.058	.608	1.995	.052

a. Dependent Variable: indeks\_ISR

## Hasil Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.526	7	.218	10.896	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.920	46	.020		
	Total	2.446	53			

a. Predictors: (Constant), gaji\_DPS, umur\_DPS, reputasi\_DSN, frekuensi\_rapat\_DPS, jumlah\_DPS, rangkap\_jabatan\_DPS, tingkat\_pendidikan\_DPS

b. Dependent Variable: indeks\_ISR